



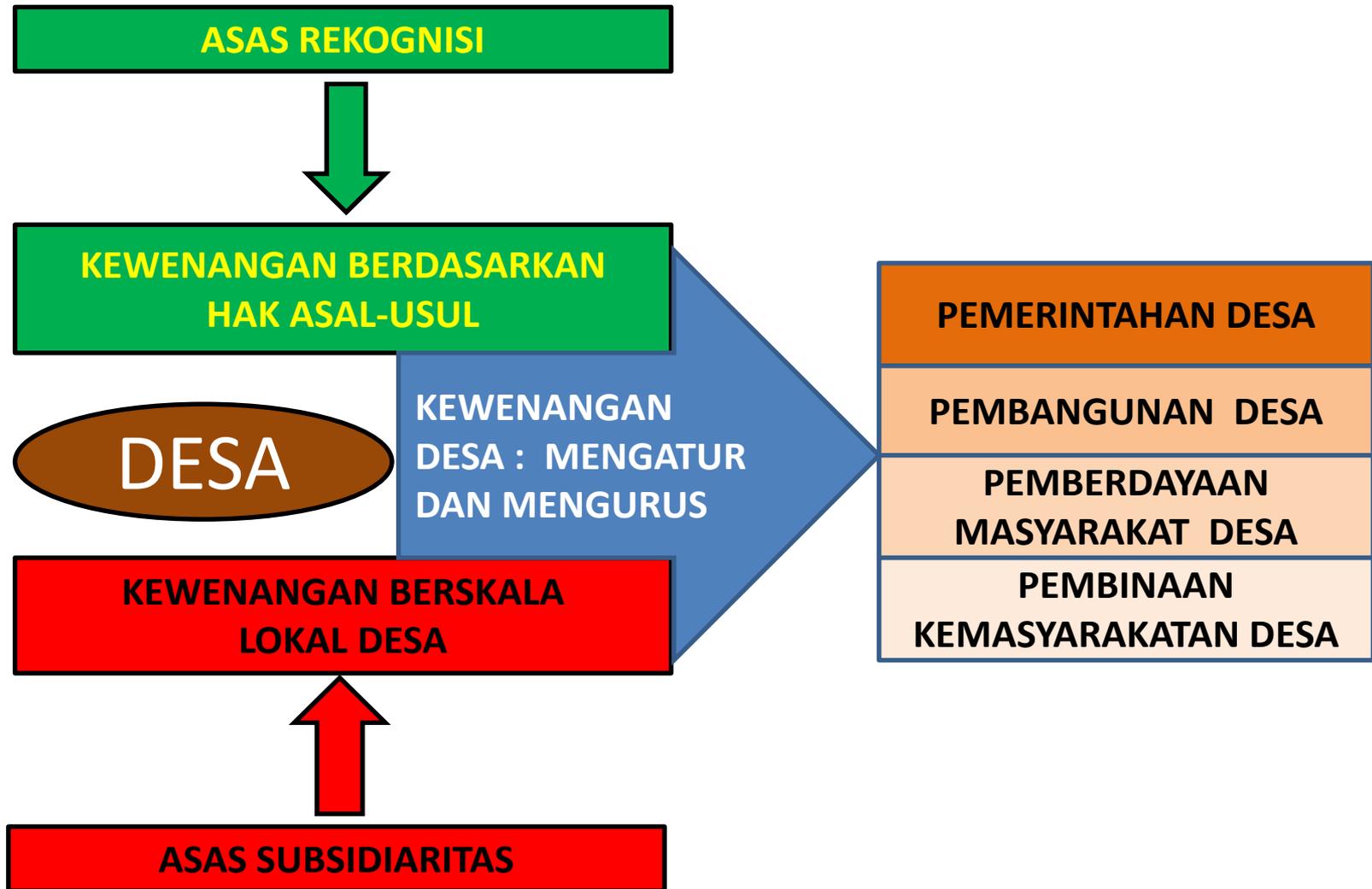
PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Taufik Madjid, S.Sos, M.Si
**Direktur Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Jakarta, 15 Januari 2018

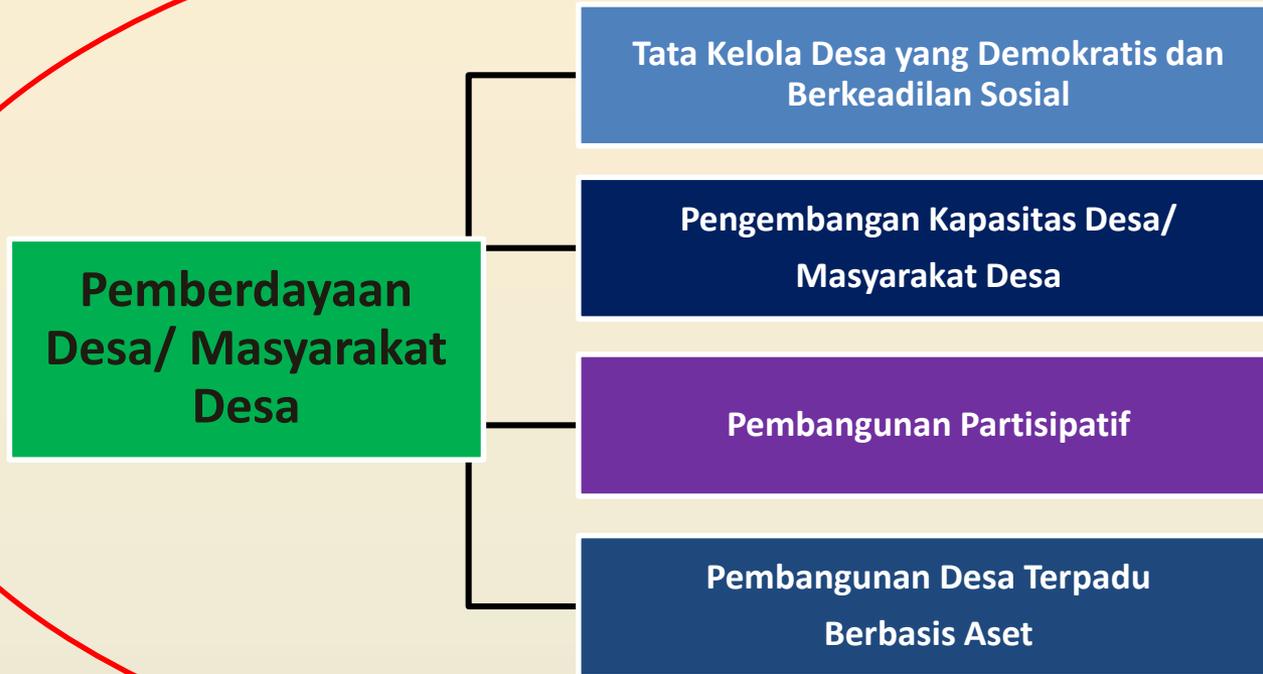


VISI KEDAULATAN DESA



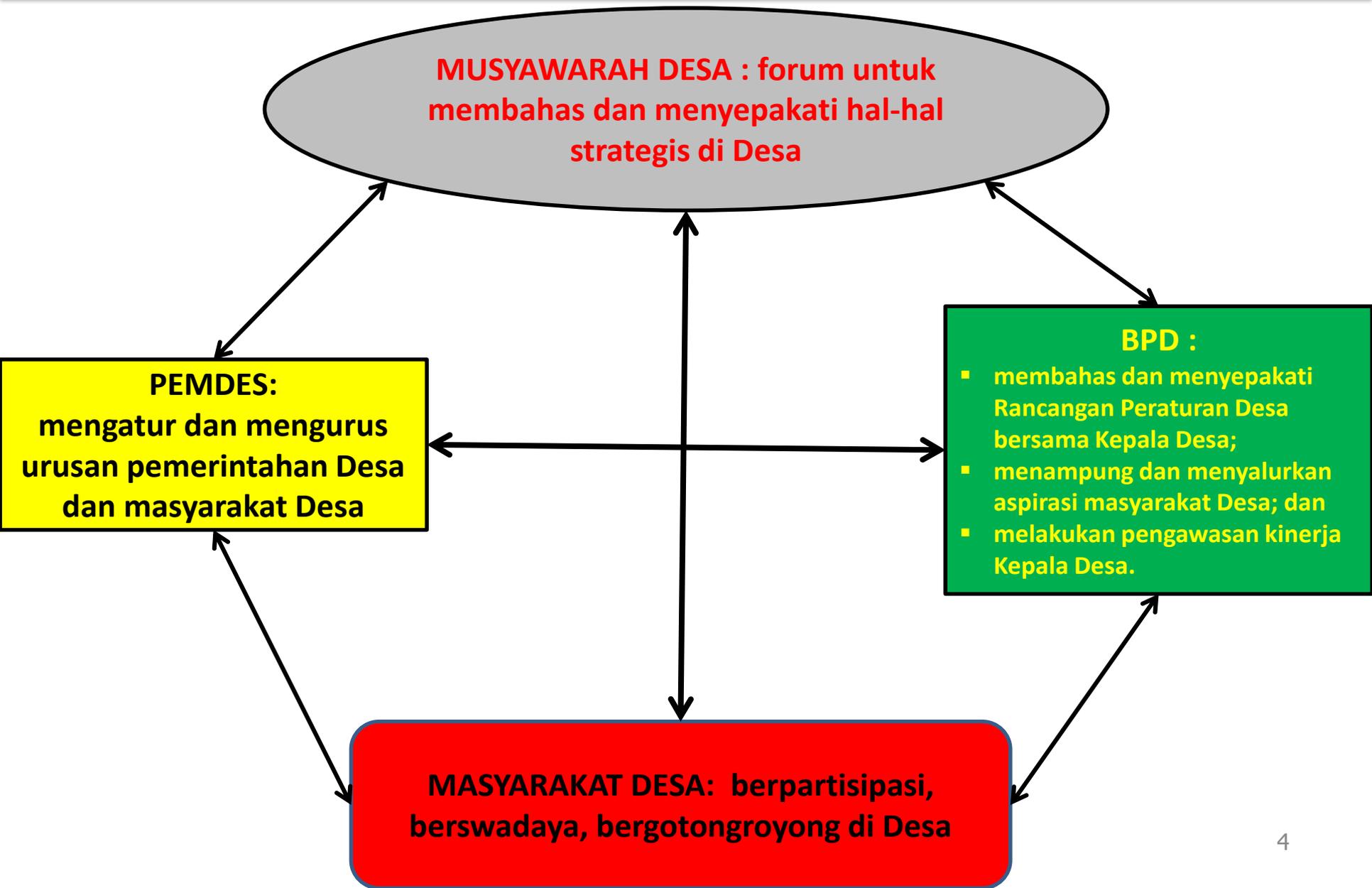
Kedaulatan adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Hal ini tampak tegas disebutkan dalam definisi Desa menurut UU Desa yaitu bahwa Desa dalam batas wilayahnya berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Komponen Pokok Pemberdayaan Desa/Masyarakat Desa



Pendampingan

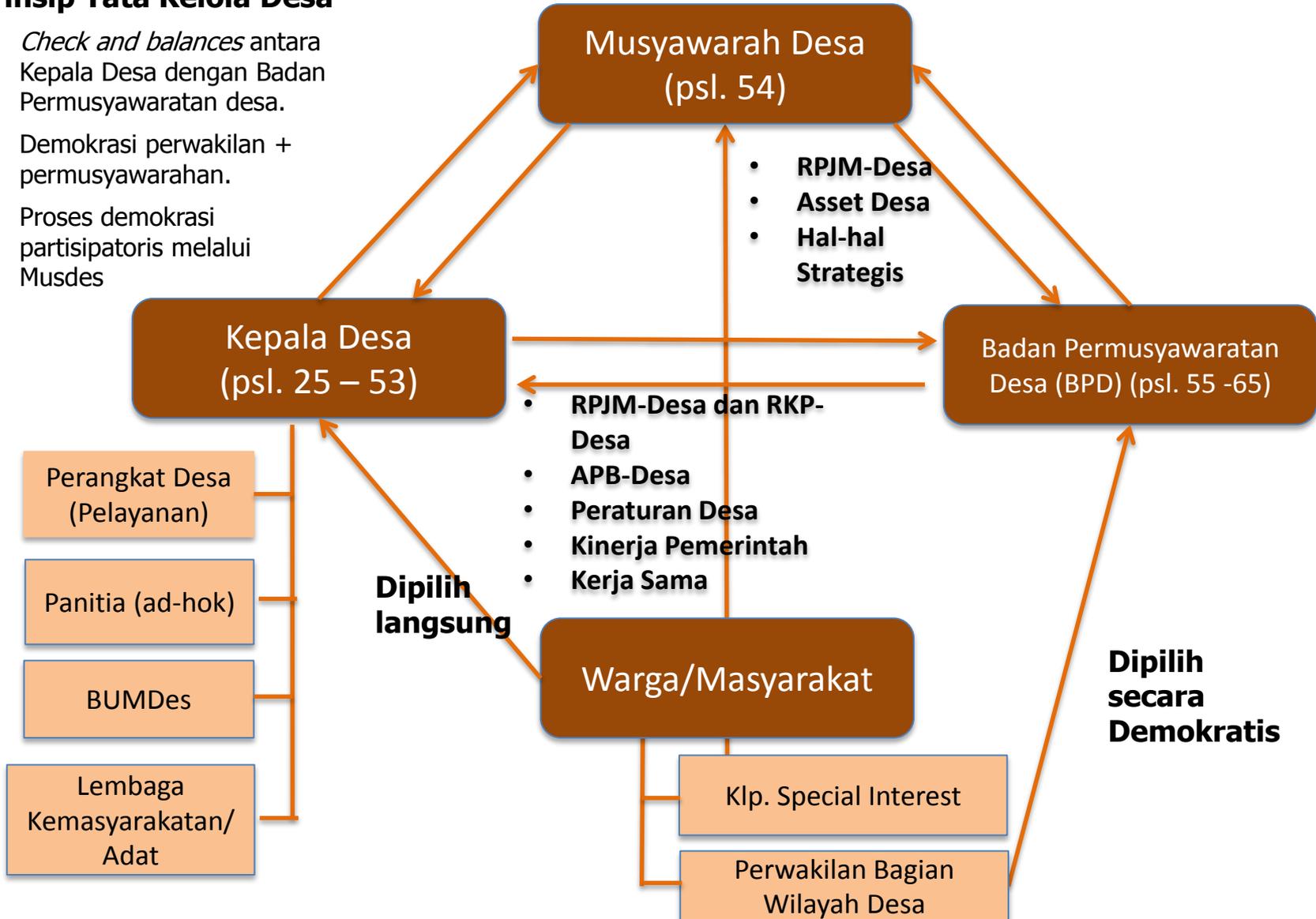
TATA KELOLA DESA yang Demokratis dan Berkeadilan Sosial



TATA KELOLA DESA yang Demokratis dan Berkeadilan Sosial

Prinsip Tata Kelola Desa

- *Check and balances* antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa.
- Demokrasi perwakilan + permusyawarahan.
- Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes



TUJUAN PEMBANGUNAN DESA (Ps 78 UU Desa)

Pasal 74 ayat 2 (dan penjelasannya) kebutuhan primer dan pelayanan dasar:

Kebutuhan primer: sandang, papan, pangan

Pelayanan dasar : pendidikan, kesehatan, infrastruktur

Meningkatkan KUALITAS HIDUP Manusia

Meningkatkan KESEJAHTERAAN Masyarakat Desa

PENANGGULANGAN KEMISKINAN



Mengedepankan Kebersamaan, Kekeluargaan, Kegotongroyongan guna mewujudkan Pengarusutamaan Perdamaian & Keadilan Sosial

DESA KUAT, MAJU, MANDIRI, DEMOKRATIS

PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN

TATA KELOLA DESA YANG DEMOKRATIS

PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

- a. Peningkatan Pelayanan Dasar;
- b. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan
- c. Pengembangan Ekonomi Pertanian Berskala Produktif;
- d. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- e. Peningkatan Kualitas Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat Desa

DANA DESA SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN DESA

- ✓ **BERDASARKAN ASAS REKOGNISI DAN SUBSIDIARITAS, NEGARA HADIR DI DESA-DESA DENGAN CARA MENYALURKAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) SEBAGAI SALAH SATU PENDAPATAN DESA UNTUK DIGUNAKAN DESA MEMBIAYAI KEWENANGANNYA SECARA MANDIRI**
- ✓ **DANA DESA MERUPAKAN DANA REKOGNISI NEGARA KEPADA DESA SEHINGGA DESA BERDAYA MENGATUR DAN MENGURUS KEWENANGANNYA SECARA MANDIRI.**

Arah Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

PermenDesa-PDPT No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Pasal 4

- 1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- 3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- 4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- 5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

MANDAT SKB-4

PENGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan:

1. Penguatan pendamping profesional untuk:
 - a. Mengawal pelaksanaan padat karya tunai di desa; dan
 - b. Berkoordinasi dengan pendamping lainnya dalam program pengentasan kemiskinan.
2. *Refocusing* penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa, melalui koordinasi dengan kementerian terkait;
3. Fasilitasi penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa;
4. Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa; dan
5. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai dari Dana Desa dengan mekanisme swakelola dan diupayakan tidak dikerjakan pada saat musim panen.



KEBIJAKAN DANA DESA

± Rp 280,3 juta / desa

Rp 20,67 T

2015

Penyerapan sebesar

82,72%

74.093 desa

± Rp 643,6 juta / desa

Rp 46,98 T

2016

Penyerapan sebesar

97,65%

74.754 desa

± Rp 800,4 juta / desa

Rp 60 T

2017

Penyerapan tahap I sebesar

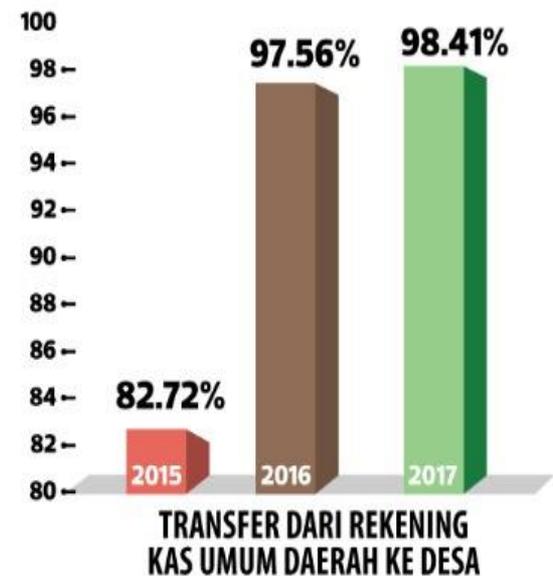
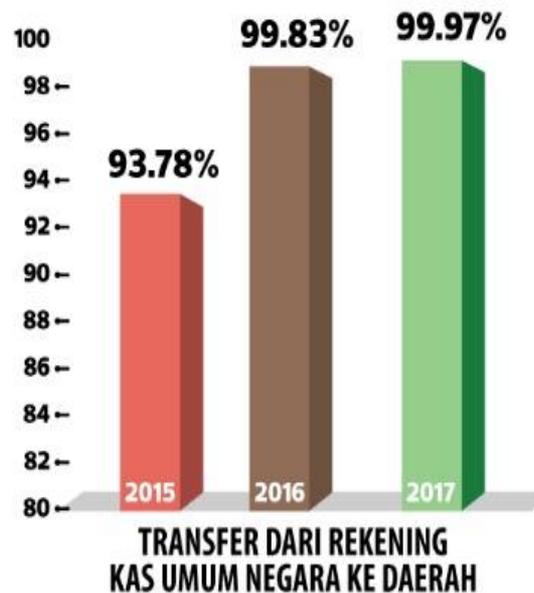
98,41%

74.910 desa



**KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DESA**

**PENYALURAN DANA DESA
TAHUN 2015, 2016
DAN TAHUN 2017 TAHAP 1**



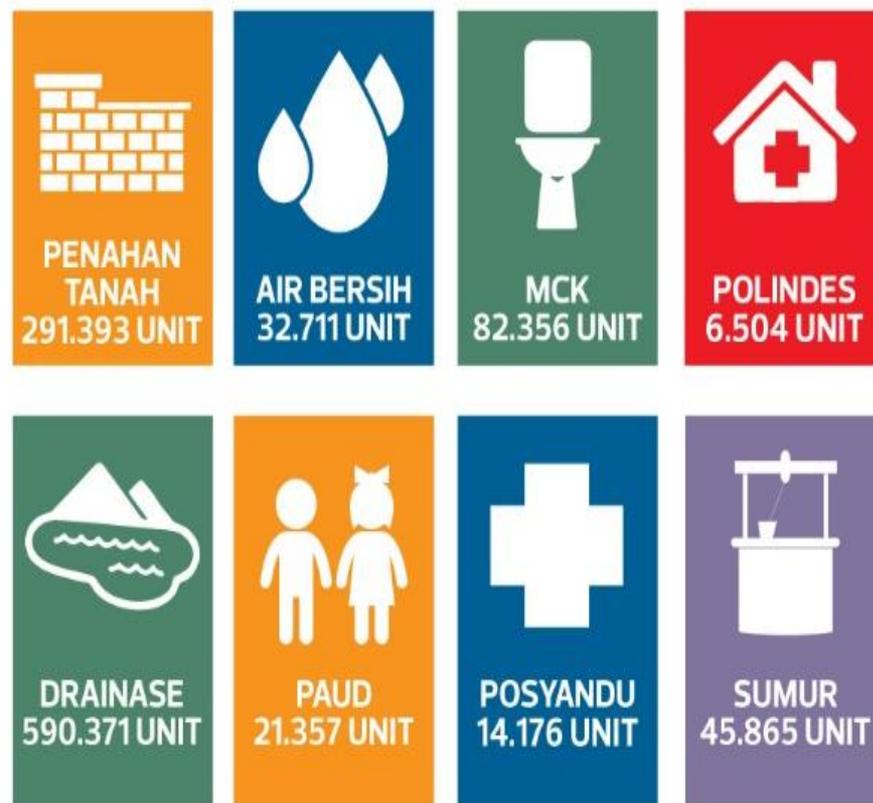


REKAPITULASI PEMANFAATAN DANA DESA TAHUN 2015, 2016, 2017 TAHAP 1

MENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT



MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DESA





SERAPAN TENAGA KERJA DARI KEGIATAN KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018



12,17% (Rp 620,8 M)

Anggaran untuk pembangunan fisik yang mendukung *cash for work*



Menyerap **16.541** Tenaga Kerja

HOK **1,1 Juta**



PASAR

T. KERJA: 599
ORANG
HOK: 44.901



SANITASI DAN AIR BERSIH

T. KERJA: 5.166 ORANG
HOK: 332.596



FASILITAS UMUM

T. KERJA: 2.536 ORANG
HOK: 176.783



EMBUNG

T. KERJA: 5.371
ORANG
HOK: 268.527



JALAN

T. KERJA: 2.409
ORANG
HOK: 240.900



JEMBATAN

T. KERJA: 460
ORANG
HOK: 46.020

KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA UNTUK UPAH TENAGA KERJA SWAKELOLA DARI KEGIATAN DANA DESA



ANALISA KOMPONEN BIAYA PER MENU KEGIATAN PADA PEMANFAATAN DANA DESA

NO	KOMPONEN	UPAH TENAGA KERJA (%)	BIAYA MATERIAL (%)
1	Jalan	15	70
2	Pasar Desa	30	69
3	Bronjong/Talud	22	75
4	Irigasi	40	57
5	Embung	38	48
6	Drainase	30	67
7	Jembatan	15	70
8	MCK	30	67
9	Sumur	30	67
10	Air Bersih	30	67
11	Sarana Olahraga Desa	30	67
12	PAUD	30	67
13	Posyandu	30	67
14	Polindes	30	67



ANALISA KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA UNTUK UPAH TENAGA KERJA SWAKELOLA DARI KEGIATAN DANA DESA

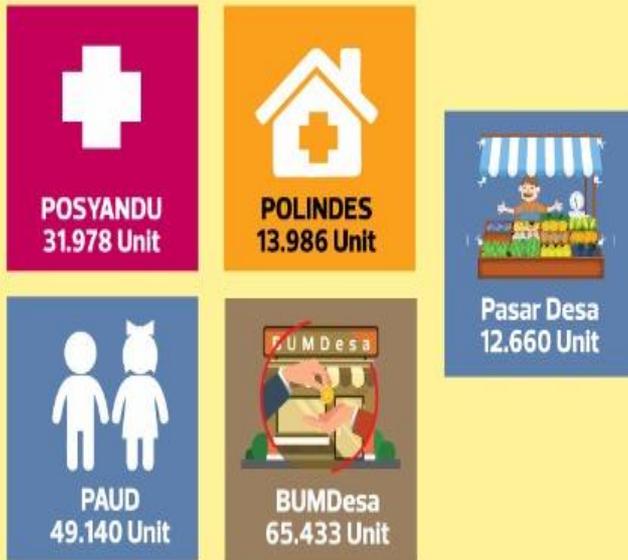
	TENAGA KERJA 30% DARI DD (JUTA ORANG)	TENAGA KERJA 40% DARI DD (JUTA ORANG)	TENAGA KERJA 50% DARI DD (JUTA ORANG)
30 Hari	10,0	13,3	16,6
60 Hari	5,0	6,6	8,3
90 Hari	3,3	4,4	5,5



MINIMUM 30% DARI DANA DESA DIGUNAKAN UNTUK UPAH TENAGA KERJA;
30% UPAH MENCIPTAKAN 300 JUTA HARI ORANG KERJA (HOK) DAN SETARA 5 JUTA TENAGA KERJA. SEDANGKAN, UNTUK 40% MENCIPTAKAN 400 JUTA HOK DAN SETARA 6.6 JUTA TENAGA KERJA.

PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA YANG BERKELANJUTAN DARI DANA DESA TAHUN 2015, 2016, 2017, DAN 2018

HASIL DANA DESA



POTENSI TENAGA KERJA TERSERAP



Keterangan:
Diasumsikan setiap infrastruktur yang terbangun berpotensi menyerap 4 tenaga kerja baru

Pada Tahun 2018 akan tercipta 5-6,6 Juta lapangan kerja padat karya dan 692.788 keberlanjutan lapangan kerja dari Dana Desa 2015-2018. **Total akan tercipta 5,7-7,3 Juta lapangan kerja.**

POTENSI PRUKADES DAN AKSES GALIAN TAMBANG UNTUK EMBUNG/IRIGASI DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA



NO	KOMODITAS UNGGULAN	JUMLAH IMPOR	PRODUKTIVITAS	KEBUTUHAN LAHAN USAHA TANI	POTENSI PENYERAPAN TENAGA KERJA
1	Jagung	5 Juta Ton	5 Ton/Ha	500 Ribuan Ha	1 Ha menyerap 10 Tenaga Kerja 500 Ribuan Ha = 5 Juta Orang
2	Gula	3.5 Juta Ton	7 Ton/Ha	500 Ribuan Ha	1 Ha menyerap 20 Tenaga Kerja 500 Ribuan Ha = 10 Juta Orang
3	Garam	3 Juta Ton	100 Ton/Ha	300 Ribuan Ha	1 Ha menyerap 10 Tenaga Kerja 300 Ribuan Ha = 3 Juta Orang

POTENSI GALIAN TAMBANG UNTUK EMBUNG/IRIGASI

TERDAPAT 632 BEKAS GALIAN TAMBANG DI KALIMANTAN TIMUR YANG BERPOTENSI DIJADIKAN EMBUNG/IRIGASI;

TERDAPAT POTENSI PENYERAPAN 34.760 TENAGA KERJA UNTUK PEMBANGUNAN EMBUNG DAN POTENSI MENYERAP 11.376 TENAGA KERJA UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI (TOTAL 46.136 TENAGA KERJA).





4 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

**PRUKADES
(PRODUK UNGGULAN
KAWASAN PERDESAAN)**



**BUM DESA
(BADAN USAHA
MILIK DESA)**



**4 PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DESA**

EMBUNG DESA



**RAGA DESA
(SARANA OLAHRAGA
DESA)**



PRODUK UNGGULAN KAWASAN PERDESAAN (PRUKADES)



82,77%

PENDUDUK DESA HIDUP DI SEKTOR PERTANIAN

PROBLEMATIKA

1. Skala ekonomi kecil;
2. Akses pasar yang sangat terbatas;
3. Tidak terintegrasi vertikal;
4. Tidak tersedianya industri paska panen;
5. Minim permodalan;
6. Keterlibatan swasta yang minim.

SOLUSI

1. Klusterisasi produk unggulan desa;
2. Menciptakan integrasi vertikal;
3. Pelibatan swasta untuk industri paska panen.

DAMPAK

1. Produktivitas ekonomi perdesaan bisa ditingkatkan;
2. Pengelolaan lebih efisien;
3. Biaya produksi bisa ditekan dan profit bisa maksimal untuk masyarakat desa.



FORUM PRUKADES KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI DENGAN K/L LAIN DAN PEMERINTAH DAERAH

DUNIA USAHA YANG TERLIBAT:



PT. SWEN INOVASI TRANSFER | PT. HASFARM | PT. SALIM GROUP
PT. SEGER AGRO NUSANTARA | SAMPOERNA STRATEGIC

KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG TERLIBAT:



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

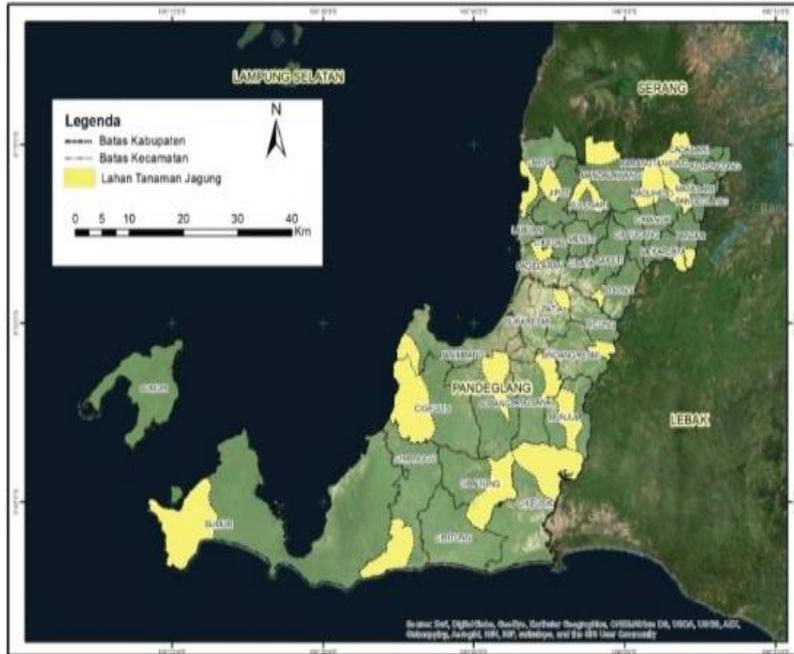


DAFTAR 43 KABUPATEN YANG TELAH MENGIKUTI FORUM PRUKADES

NO	KABUPATEN	NO	KABUPATEN	NO	KABUPATEN
1	Bondowoso	16	Tana Tidung	31	Gorontalo
2	Halmahera Barat	17	Pandeglang	32	Bone Bolangi
3	Bolaang Mongondow Timur	18	Humbang Hasundutan	33	Purbalingga
4	Hulu Sungai Utara	19	Sigi	34	Malang
5	Poso	20	Pekalongan	35	Bogor
6	Pesisir Barat	21	Nias Utara	36	Karawang
7	Manokwari Selatan	22	Alor	37	Mamuju Tengah
8	Musi Rawas	23	Toba Samosir	38	Pinrang
9	Bangka Selatan	24	Sleman	39	Bengkulu Selatan
10	Minahasa Utara	25	Lombok Barat	40	Sumbawa Barat
11	Demak	26	Nunukan	41	Pekalongan
12	Soppeng	27	Katingan	42	Garut
13	Karawang	28	Sumedang	43	Tasikmalaya
14	Ciamis	29	Cianjur		
15	Purwakarta	30	Majalengka		



PENGEMBANGAN PRUKADES DI KABUPATEN PANDEGLANG (KOMODITAS JAGUNG)



LUAS PENGEMBANGAN : **50.000 HA** | RATA-RATA PRODUKTIVITAS: **5 TON/HA**
ESTIMASI PRODUKSI: **250.000 TON** | HARGA JAGUNG **RP 3.000,-/KG.**
ESTIMASI PENDAPATAN: **RP 750 MILIAR.** | JIKA BISA PANEN 2 KALI DALAM SETAHUN
DENGAN ADANYA EMBUNG, **MAKA DIHASILKAN RP 1,5 TRILIUN.**

LEBIH BESAR DIBANDINGKAN PAD KABUPATEN PANDEGLANG YANG HANYA
RP 120 MILIAR DAN PENDAPATAN APBD YANG HANYA RP 800 MILIAR

- » Dukungan K/L, BUMN dan pihak swasta;
- » Bibit jagung, pupuk, alat pasca panen dari Kementan;
- » Kementerian PUPR membangun 11 Jembatan untuk aksesibilitas hasil pertanian;
- » Dunia usaha seperti Artha Graha, Japfa Comfeed, PT Seger Agro
- » Nusantara, Carrefour dan Indofood menampung produknya dan berkomitmen membuat sarana paska panen;
- » Kementerian BUMN melalui HIMBARA memberikan kredit pada masyarakat maupun dunia usaha.



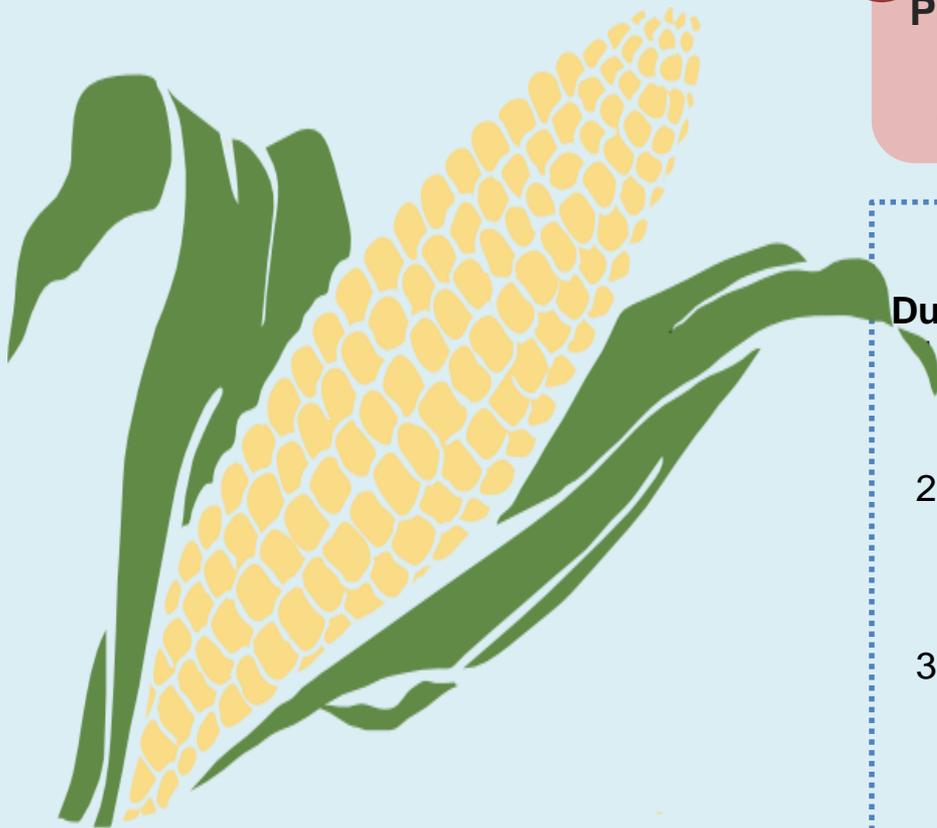
Lahan Tanam di Kabupaten Pandeglang



Kondisi Jagung yang disimpan sebelum dikeringkan di Gudang Penyimpanan BUMD



PRUKADES DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT (KOMODITAS JAGUNG)



1

**LUAS
PENGEMBANGAN**
:
20.000 HEKTAR

2

**TARGET
PRODUKSI:**
80.000 TON

Dukungan program:

1. Pemerintah Daerah menyediakan lahan hibah seluas 4 hektar
2. Perum BULOG sebagai *off taker* dan membantu pembangunan gudang penyimpanan
3. Kementerian Desa PDTT membantu memfasilitasi pembiayaan dari Perbankan



PENGEMBANGAN PRUKADES DI KOTA TERPADU MANDIRI MESUJI



>> **Luas tanam padi:** 43.497 Ha (1,5 masa tanam),

>> **Produksi:** 217.410 ton (1,5 masa tanam);

>> **Rice Milling Plant (RMP):**

- Kapasitas giling per jam: 1,2 ton/jam;

- Kapasitas waktu giling: 8 jam/hari;

>> **Pendapatan:** Rp 859.873.120,- per tahun.

Pendapatan petani dari *on farm* tanaman pangan (padi & jagung) rata-rata sebesar Rp 3.010.000,-/bulan (UMR Kab. Mesuji Rp 1.908.447,-).



Bantuan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi:

>> Mobil Pick Up L300 (dari DAK 2017) 6 unit kepada 6 BUM Desa;

>> Bantuan dana Rp 250 Juta pada 5 BUM Desa;

>> 1 Paket Peralatan Packing (tambahan untuk RMP) Kepada Manajer RMP (Timbangan Duduk Manual, Vacuum Sealer, Kantong Kemasan)

Dukungan dari BNI:

>> Gerobak Motor (program CSR) kepada BUM Desa Harapan Jaya;

>> Bantuan KUR kepada 10 petani dengan total nilai Rp 60 Juta;

>> Penyerahan 1.500 Kartu Tani.



PRUKADES DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (BUDIDAYA UDANG)

1. **Luas pengembangan:** 22.548 Hektar
2. **Off Taker** potensial untuk memenuhi permintaan pasar Asia dan Amerika:
 - PT Central Pertiwi Bahari (CPB);
 - PT Centra Proteina Prima (CP Prima);
 - PT Indokom Samudra Persada.



Dukungan Program:

- Pemerintah Kabupaten membantu pembangunan Dermaga Perikanan dan TPI, Pengolahan Pasca panen, pemasaran produk, pemberian kredit lunak petani ikan dan nelayan dan *Cold Storage*;
- Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi membantu pembangunan jalan akses antar desa dan pabrik es mini;
- Memfasilitasi *partnership* pihak swasta, serta kerjasama dengan Bulog dan Himpunan Bank Milik Negara.



PEMBANGUNAN EMBUNG DESA

SELAMA INI PANEN HANYA
BISA DILAKUKAN 1-1,5 KALI
DALAM SATU TAHUN



DANA DESA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK
MEMBANGUN EMBUNG SEBESAR RP 200-500 JUTA/UNIT



DENGAN ADANYA EMBUNG,
PANEN BISA DILAKUKAN
2 HINGGA 3 KALI DALAM SETAHUN

MANFAAT LAIN ADANYA EMBUNG:



KEGIATAN
WISATA



BUDIDAYA
PERIKANAN

• DUKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA LAIN: •



KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN:
- BANTUAN BIBIT IKAN
- BANTUAN POMPA AIR

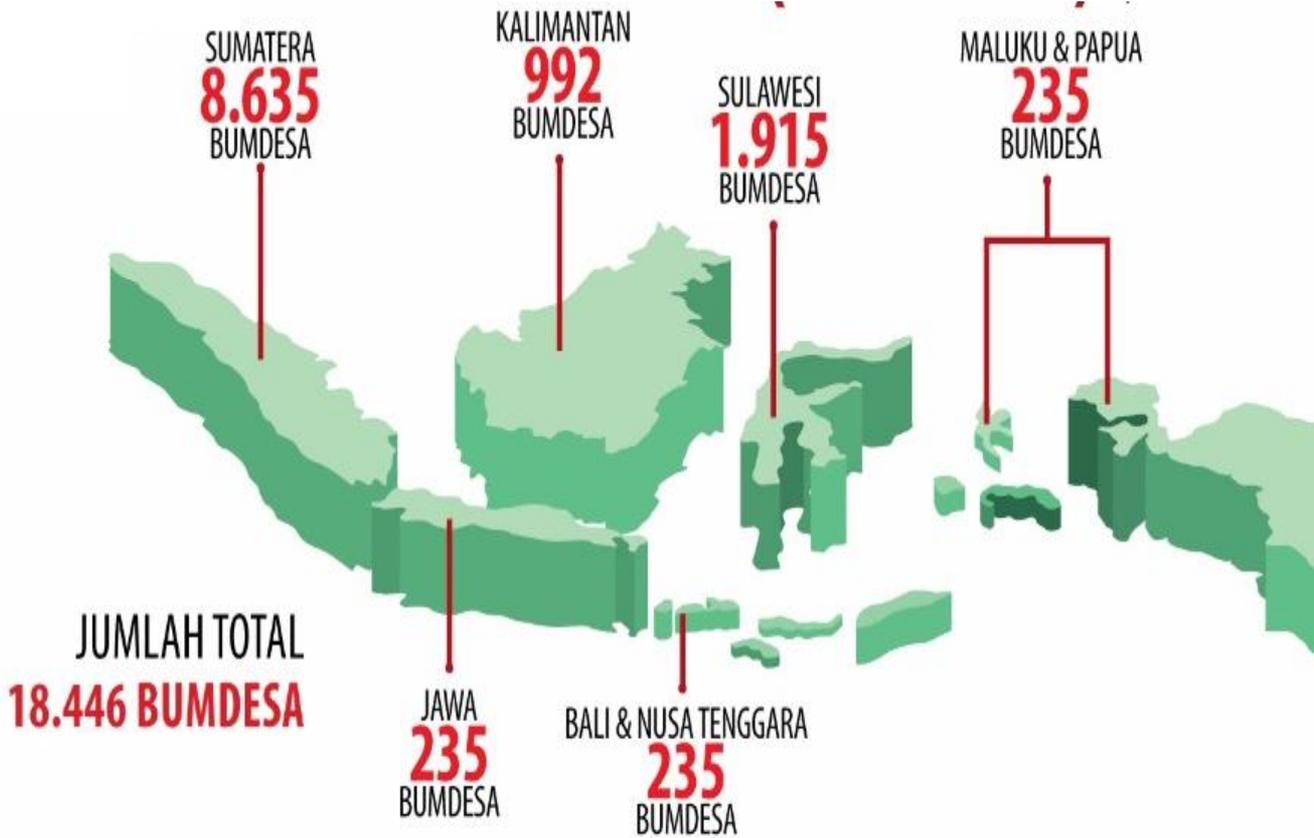


KEMENTERIAN PERTANIAN:
POMPA DISTRIBUSI
DAN BIBIT POHON

BADAN USAHA MILIK DESA

NO	PROVINSI	JUMLAH BUMDESA
1	Nangroe Aceh Darussalam	6.728
2	Sumatera Utara	430
3	Bali	336
4	Bangka Belitung	19
5	Banten	146
6	Bengkulu	360
7	D.I Yogyakarta	148
8	Gorontalo	68
9	Jambi	11
10	Jawa Barat	2.964
11	Jawa Tengah	1.413
12	Jawa Timur	1.424
13	Kalimantan Timur	369
14	Kalimantan Tengah	256
15	Kalimantan Selatan	160
16	Kepulauan Riau	20
17	Lampung	255
18	Maluku	76
19	Nusa Tenggara Barat	178
20	Riau	319
21	Sulawesi Selatan	313
22	Sulawesi Tenggara	259
23	Sulawesi Tengah	496
24	Sulawesi Utara	629
25	Sumatera Barat	339
26	Sumatera Selatan	154
27	Nusa Tenggara Timur	60
28	Kalimantan Barat	152
29	Kalimantan Utara	55
30	Maluku Utara	134
31	Papua	10
32	Papua Barat	15
33	Sulawesi Barat	150

TOTAL BUMDESA 18.446



1. Pada akhir tahun 2014, jumlah BUM Desa hanya sebanyak 1.022 Unit, namun hingga awal tahun 2017 meningkat drastis hingga 18.446 Unit.
2. BUM Desa masih dihadapkan pada persoalan keterbatasan permodalan dan investor, market share bisnis masih rendah, rendahnya manajemen operasional usaha, kompetensi SDM dan teknologi yang masih belum mumpuni, serta potensi "moral hazard" BUM Desa oleh Kepala Desa dan kelompok tertentu.

PENGEMBANGAN BUM DESA DI PONGGOK - KLATEN



JUMLAH PENDAPATAN USAHA BUM DESA TIRTA MANDIRI TIAP TAHUN MENGALAMI PENINGKATAN SIGNIFIKAN. ALOKASI LABA BUM DESA DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN UNGGULAN DESA PONGGOK YAITU: PEMBERIAN DANA PENDIDIKAN (KARTU CERDAS DESA), JAMINAN KESEHATAN (KARTU KESEHATAN ANAK), PENYALURAN DANA MELALUI LEMBAGA ZAKAT DESA. DLL



Destinasi Wisata Air



Program Jaminan Pendidikan & Kesehatan



Foodcourt Umbul Ponggok



Perkreditan Rakyat



Pabrik Air Minum Dalam Kemasan

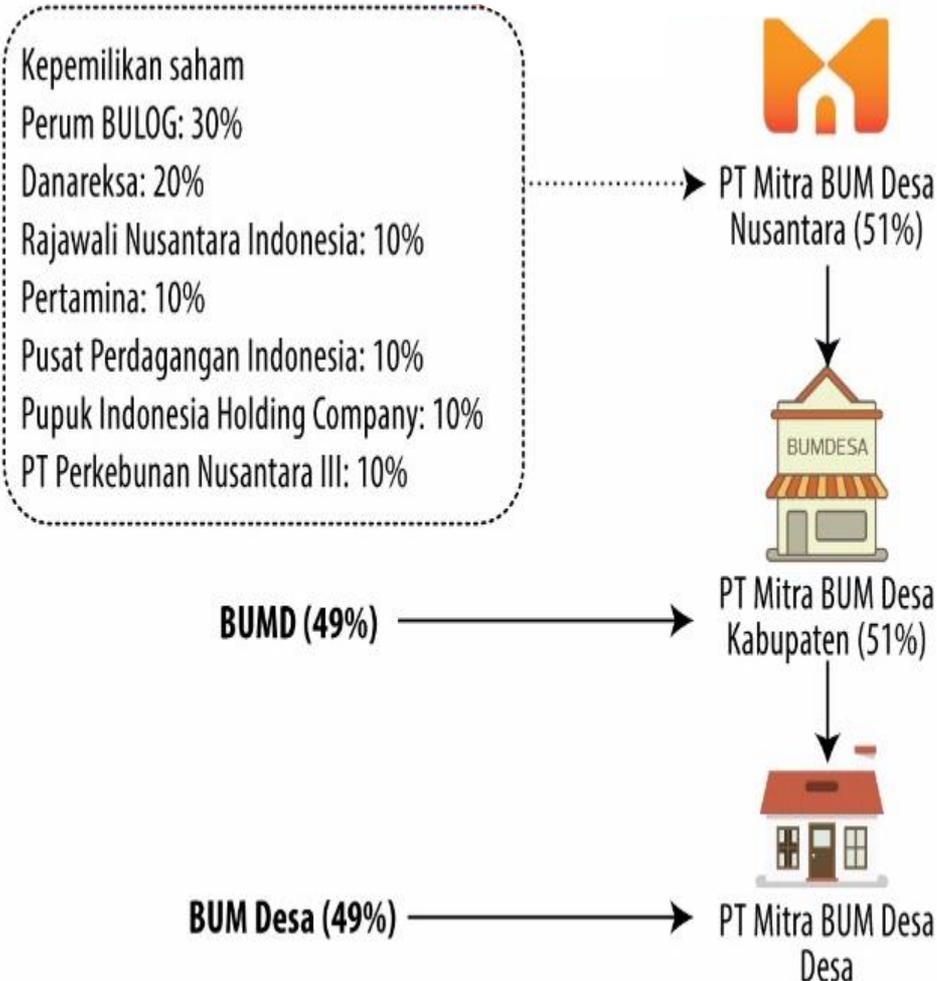


Toko Desa



Budidaya Ikan Nila Merah

PT MITRA BUM DESA



- **Telah dibentuk PT Mitra BUM Desa Nusantara;**

- Peran PT Mitra BUM Desa Nusantara:

1. **Agregator:** meningkatkan skala ekonomi BUM Desa, efisiensi pemasaran, produksi, operasional, permodalan dan perluasan jaringan investasi dan skala bisnis;
2. **Off Taker hasil produksi BUM Desa:** penjaminan daya serap produk pertanian dan peternakan dari BUM Desa, meningkatkan market share serta optimalisasi pemasaran produk;
3. **Supervisi Operasional:** standarisasi kualitas produk, prosedur dan operasional BUM Desa, peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan Good Corporate Governance.

SARANA OLAHRAGA DESA



SARANA OLAHRAGA DESA

TEMPAT BERKUMPUL MASYARAKAT DESA

MENCIPTAKAN KERAMAIAAN

MENCIPTAKAN AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT DESA

PERTUMBUHAN EKONOMI DESA

- 🏀 Pembangunan sarana olahraga desa bertujuan untuk menjadi **RUANG PUBLIK DAN MENINGKATKAN AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT DESA.**
- 🏀 Selain itu, pembangunan sarana olahraga desa juga menjadi **RUANG BAGI GENERASI MUDA UNTUK MENYALURKAN ENERGI DAN KEMAMPUANNYA PADA AKTIVITAS POSITIF** sehingga tidak terjebak dalam persoalan narkoba, tawuran dan radikalisme.
- 🏀 **DANA DESA DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK PEMBANGUNAN SARANA OLAHRAGA DESA SESUAI HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA.** Selain itu, desa juga dapat berpartisipasi melalui penyiapan tanah (misalnya : Tanah Kas Desa).



TERIMA KASIH